

**ANALISIS PENGALOKASIAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) PADA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kota Kediri)**

**M. Wahyudi**

**Dosen Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi UNISKA Kediri**

**ABSTRAK**

Kota Kediri adalah salah satu daerah yang memperoleh Pengalokasian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat. Pengalokasian Dana Alokasi Umum didasarkan atas Celah Fiskal dan Alokasi Dasar yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengalokasian Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri. Untuk menghitung Pengalokasian Dana Alokasi Umum, digunakan teknik analisis sebagai berikut, pertama menghitung Celah Fiskal dan Alokasi Dasar. Dengan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar dapat diketahui jumlah Dana Alokasi Umum yang kemudian di kontribusikan ke Pendapatan Daerah dan terakhir dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian di analisis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalokasian Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bertambah pada Pendapatan Daerah tepatnya pada Dana Transfer. Dana Alokasi Umum tersebut memiliki jumlah kontribusi terhadap Pendapatan Daerah lebih dari 50%, sehingga peran Dana Alokasi Umum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tepatnya Pendapatan Daerah sangatlah besar. Tanpa Dana Alokasi Umum defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin besar.

**Kata kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi memberikan dampak buruk bagi kehidupan bangsa Indonesia, menunjukkan akan kebutuhan reformasi yang menyeluruh disemua sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Salah satu unsur reformasi yang menyeluruh tersebut adalah menyangkut diberlakukannya otonomi daerah di tiap Propinsi dan Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia. Adapun yang mendorong diberlakukannya otonomi daerah adalah tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Pusat agar ketimpangan tersebut tidak terlalu lebar adalah dengan penerapan desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengatur pembangunan menjadi lebih tepat dan lebih baik.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah

dan DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

Pemerintah Kota Kediri merupakan salah satu kota yang menerapkan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam tujuan otonomi daerahnya Pemerintah Kota Kediri ingin mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga pemerintah harus mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jasa publik seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya. Untuk membiayai peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik tersebut, pemerintah Kota Kediri mengambil dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber-sumber pembiayaan dalam melaksanakan layanan jasa publik tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pada Dana Perimbangan, pemerintah Kota Kediri memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat sebagai bantuan guna menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah Kota Kediri. Semakin besarnya belanja daerah membuat Kota Kediri mendapatkan Dana

Alokasi Umum yang semakin besar setiap tahunnya.

#### **Batasan Penelitian**

Agar pembahasan tidak meluas, peneliti membatasi penelitian pada Analisis Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode tahun 2008 sampai dengan 2010.

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut, Bagaimana Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

### **METODE PENELITIAN**

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dititik beratkan pada Analisis Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 sampai dengan 2010 yang diambil dari data APBD Tahun Anggaran 2007 sampai dengan 2009. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah Kota Kediri tepatnya pada DPPKA yang berkedudukan di Jl.PK Bangsa No.97 Kediri.

#### **Sumber Data**

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

#### **Identifikasi Variabel**

- a. Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

### Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang dipakai oleh peneliti adalah bersifat deskriptif kuantitatif. Alat analisis dalam penelitian ini adalah Perhitungan Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) atas dasar Celah Fiskal dan Alokasi Dasar.

Langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perhitungan pengalokasian DAU, meliputi :
  1. Alokasi Dasar
  2. Celah Fiskal
- b. Menghitung Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pendapatan Daerah.
- c. Memasukkan serta menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) pada Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## PEMBAHASAN

### A. Perhitungan Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhitungan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) atas dasar Alokasi Dasar dan Celah Fiskal.

#### a. Analisis Jumlah dan Perkembangan Alokasi Dasar

Berdasar Jumlah Alokasi Dasar Kota Kediri Tahun Anggaran 2007-2009, dapat dijelaskan bahwa jumlah Alokasi Dasar paling kecil adalah pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp189.532.451.977,00. Pada tahun 2007 tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurangnya jumlah Alokasi Dasar dari tahun sebelumnya, karena data APBD yang dipakai hanya dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Pada tahun 2008 mengalami peningkatan dengan jumlah Rp240.762.174.073,56 yaitu bertambah sebesar Rp51.229.722.096,56. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009 dengan jumlah Rp301.140.720.002,87 yaitu Rp60.378.545.929,31 lebih besar dari tahun

sebelumnya. Jumlah Alokasi Dasar tersebut diperoleh dari penjumlahan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jumlah Alokasi Dasar tersebut sudah terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada bagian Belanja Pegawai. Jumlah Alokasi Dasar pada Pemerintah Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pegawai di Pemerintah Kota Kediri dan juga adanya peraturan baru mengenai gaji serta tunjangan untuk Pegawai Negeri Sipil sehingga jumlah pengeluaran untuk gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dari tahun ketahun semakin meningkat.

#### b. Perhitungan dan Analisis Celah Fiskal

Celah Fiskal adalah selisih yang didapat dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal.

#### 1. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan Fiskal merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang meliputi pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan lain sebagainya.

##### a) Total Belanja Daerah Rata-rata.

Total Belanja Daerah Rata-rata dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Total Belanja Daerah Rata-rata} = \frac{\text{B.Pegawain+B.Barang+B.Modal}}{\text{Jml Kabupaten dan Kota}}$$

Dari perhitungan di atas, maka diperoleh data mengenai Total Belanja Rata-rata Pemerintah Kota Kediri pada tahun 2007-2009 seperti pada Tabel 22.

Tabel 22. Total Belanja Daerah Rata-rata Periode Tahun 2007-2009 (Rp)

Periode Tahun	Jumlah	Bertambah (Berkurang)
2007	1.042.108.511,00	-
2008	973.478.793,50	(68.629.717,50)
2009	1.235.390.631,00	261.911.837,50

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 22 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2007 Pemerintah Kota Kediri mempunyai Total Belanja Daerah Rata-rata sekitar Rp 1.042.108.511,00. Pada tahun tersebut tidak terdapat keterangan mengenai bertambah atau berkurangnya Total Belanja Daerah Rata-rata dari tahun sebelumnya, karena data yang digunakan oleh peneliti hanya pada tahun 2007-2009. Sedangkan pada tahun 2008 jumlah Total Belanja Daerah Rata-rata Kota Kediri turun menjadi Rp. 973.478.793,50 yaitu mengalami penurunan sebesar Rp. 68.629.717,50 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada tahun 2009 yang naik menjadi Rp. 1.235.390.631,00 yaitu bertambah sebesar Rp. 261.911.837,50 dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang besar tersebut terjadi karena meningkatnya jumlah belanja pegawai, belanja modal dan juga belanja barang pada tahun 2009 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Total Belanja Daerah Rata-rata Kota Kediri berubah-ubah setiap tahunnya. Antara tahun 2007-2009, Total Belanja Daerah Rata-rata terbesar adalah pada tahun 2009, sedangkan yang terkecil adalah pada tahun 2008.

- b) Jumlah Indeks dalam Kebutuhan Fiskal terdiri dari Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks PDRB per Kapita.

### 1) Indeks Jumlah Penduduk (IJP).

Indeks Jumlah Penduduk dapat dihitung sebagai berikut :

$$IJP = \frac{\text{Jumlah penduduk daerah}}{\text{Rata-rata jumlah penduduk nasional}}$$

Dari perhitungan diatas diperoleh hasil Indeks Jumlah Penduduk beserta pertumbuhannya pada tahun 2007-2009 dalam Tabel 23, sebagai berikut.

Tabel 23. Indeks Jumlah Penduduk Periode Tahun 2007-2009

Periode Tahun	Jumlah	Bertambah (Berkurang)
2007	0,001067601	-
2008	0,001207364	0,000139763
2009	0,001289905	0,000082541

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 23 diatas, dapat diketahui bahwa Indeks Jumlah Penduduk Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009 selalu mengalami kenaikan. Tahun 2007 Indeks Jumlah Penduduk Kota Kediri sebesar 0,001067601. Pada tahun tersebut tidak terdapat keterangan tentang bertambah atau berkurangnya Indeks Jumlah Penduduk dari tahun sebelumnya karena data yang dipakai hanya pada tahun 2007-2009. Sedangkan pada tahun 2008 meningkat sejumlah 0,001207364, yaitu bertambah 0,000139763 dari tahun sebelumnya. Indeks Jumlah Penduduk terbesar adalah pada tahun 2009 sejumlah 0,001289905 yaitu meningkat sebesar 0,000082541. Peningkatan Jumlah Indeks Penduduk tersebut mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik disetiap daerah Kota Kediri semakin baik

### 2) Indeks Luas Wilayah (ILW).

Indeks Luas Wilayah Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 relatif tetap. Indeks Luas Wilayah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$ILW = \frac{\text{Luas Wilayah Daerah}}{\text{Rata-rata Luas Wilayah secara Nasional}}$$

Dari data yang diperoleh sebelumnya, Indeks Luas Wilayah dapat dihitung sebagai berikut :

$$ILW (2007-2009) = \frac{63,404}{4,006} = 0,015593176$$

Perhitungan Indeks Luas Wilayah untuk Pemerintah Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 relatif tetap dan tidak berubah yaitu sebesar 0,015593176. Jumlah Indeks Luas Wilayah tersebut mencerminkan kebutuhan akan penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 relatif tetap.

**3) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).**

Dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri diperoleh data mengenai Indeks Kemahalan Konstruksi. Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 selalu mengalami peningkatan. IKK terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 148,97. Pada tahun 2007 tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang pada tahun sebelumnya, karena data yang dipakai oleh peneliti hanya pada tahun 2007-2009. Pada tahun 2008 meningkat sejumlah 175,05, yaitu bertambah sebesar 26,08. Tahun 2009 jumlah Indeks Kemahalan Konstruksi meningkat sejumlah 191,79, yaitu 16,74 lebih besar dari tahun sebelumnya. Peningkatan Indeks Kemahalan Konstruksi tersebut mencerminkan peningkatan harga bahan bangunan per m<sup>2</sup> di Kota Kediri.

**4) Indeks Pengembangan Manusia (IPM).**

Dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri diperoleh data mengenai Indeks Pengembangan Manusia, bahwa Indeks Pertumbuhan Kota Kediri tahun 2007 mencapai 72,49. Pada tahun

tersebut Jumlah Indeks Pertumbuhan Manusia tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya, karena peneliti hanya menggunakan data tahun 2007-2009. Pada tahun 2008 Jumlah Indeks Pertumbuhan Manusia meningkat sejumlah 73,39 , yaitu bertambah sebesar 0,90 dari tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sejumlah 75,42 , yaitu bertambah sebesar 2,03 dari tahun 2008. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, IPM Kota Kediri selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Kediri atas layanan pendidikan dan kesehatan, karena secara riil pencapaian IPM dapat diketahui dari tingkat kesejahteraan masyarakat.

**5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.**

Indeks PDRB per Kapita dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{DRB Per Kapita Daerah}}{\text{Rata2 PDRB}}$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui Jumlah PDRB per Kapita Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009, sebagai mana yang tertulis pada Tabel 24.

Tabel 24. Jumlah PDRB per Kapita Kota Kediri Tahun 2007-2009

Periode Tahun	Jumlah	Bertambah (Berkurang)
2007	11,19413626	-
2008	10,70091794	(0,493218320)
2009	10,87536969	0,1744517499

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 24 diatas, dapat diketahui jumlah PDRB per kapita tertinggi dari Kota Kediri adalah pada tahun 2007 yaitu sebesar 11,19. Pada tahun 2007, Jumlah PDRB per kapita tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya, karena peneliti hanya menggunakan data tahun 2007-2009. Tahun 2008 Jumlah PDRB per kapita turun menjadi 10,70, yaitu turun sebesar 0,49. Pada tahun 2009 PDRB per kapita Kota Kediri mengalami peningkatan menjadi 10,88 yaitu bertambah sebesar 0,17 dari tahun sebelumnya. Jumlah PDRB per kapita Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 berubah-ubah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dan aktivitas perekonomian Kota Kediri pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 masih dalam kondisi berubah-ubah.

c) Perhitungan Kebutuhan Fiskal

Dari semua perhitungan diatas, Kebutuhan Fiskal dapat dihitung sebagai berikut :

Kebutuhan Fiskal =

$$\text{Total Belanja Daerah Rata-rata} \times \left[ \begin{matrix} \text{Indeks Jml Penduduk} + \\ \text{Indeks Luas Wil} + \text{Indeks} \\ \text{Kemahalan Konstruksi} + \\ \text{Indeks Pembangunan} \\ \text{Manusia} + \text{Indeks PDRB per} \\ \text{Kapita} \end{matrix} \right]$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui Jumlah Kebutuhan Fiskal Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, sebagai mana yang tertuang dalam Tabel 25.

Tabel 25. Jumlah Kebutuhan Fiskal Kota Kediri Tahun 2007-2009

Periode Tahun	Jumlah	Bertambah (Berkurang)
2007	242.468.217.853,41	-
2008	252.284.543.112,12	9.816.325.258,71
2009	343.564.917.533,28	91.280.374.421,16

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 25 dapat diketahui bahwa Kebutuhan Fiskal Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 Kebutuhan Fiskal Kota Kediri sebesar Rp242.468.217.853,41. Pada tahun tersebut jumlah Kebutuhan Fiskal tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya, karena data yang digunakan peneliti hanya pada tahun 2007-2009. Tahun 2008 Jumlah Kebutuhan Fiskal meningkat menjadi Rp252.284.543.112,12 yaitu bertambah sebesar Rp9.816.325.258,71. Peningkatan Kebutuhan Fiskal terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar Rp343.564.917.533,28, yaitu meningkat Rp91.280.374.421,16 dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pada tahun 2009 tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya Total Belanja Rata-rata Kota Kediri yang semula hanya Rp973.478.793,50 kemudian meningkat menjadi Rp1.235.390.631. Jumlah tersebut lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

**2. Kapasitas Fiskal**

Kapasitas Fiskal merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil (Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam).

a). Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tertuang pada Tabel 4.3 sebelumnya. Dari Tabel 4.3 dapat dijelaskan mengenai Jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Pada tahun 2007 jumlah PAD Kota Kediri sebesar Rp72.485.751.709,60. Pada tahun tersebut Jumlah PAD tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya, karena peneliti hanya menggunakan data tahun 2007-2009. Distribusi terbesar PAD tahun 2007 adalah dari pendapatan Retribusi

Daerah. Tahun 2008 PAD Kota Kediri meningkat sejumlah Rp74.775.278.043,96 , yaitu bertambah sebesar Rp2.289.526.334,36. Pada tahun 2008 masih sama dengan tahun 2007, distribusi terbesarnya adalah dari pendapatan Retribusi Daerah. Tahun 2009, PAD mengalami peningkatan paling besar sejumlah Rp88.849.647.034,61 yaitu bertambah sebesar Rp14.074.368.990,65 dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut merupakan PAD terbesar antara tahun 2007 sampai dengan 2009. PAD tahun 2009 juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena distribusi terbesar PAD tahun 2009 bukan lagi bersumber dari Retribusi Daerah melainkan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp62.952.343.260,91.

b) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil tahun 2007 sampai dengan 2009 tertuang dalam Tabel 4.4 sebelumnya. Dari Tabel 4.4 dapat di jelaskan bahwa Dana Bagi hasil merupakan dana perimbangan dari pemerintah yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil dari tahun 2007 sampai dengan 2009 selalu mengalami peningkatan. Dana Bagi Hasil pada tahun 2007 sebesar Rp32.003.957.198,00. Pada tahun tersebut Jumlah Dana Bagi Hasil tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya, karena peneliti hanya menggunakan data tahun 2007-2009. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami peningkatan sejumlah Rp45.687.097.825,00 , yaitu bertambah sebesar Rp13.683.140.627,00. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2009 sejumlah Rp83.061.626.310,00 yaitu Rp37.374.528.485,00 lebih besar dari tahun sebelumnya.

c). Perhitungan Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal dapat dihitung sebagai berikut :

Kapasitas Fiskal = Pendapatan Asli daerah + Dana Bagi Hasil (Pajak dan SDA)

Dari perhitungan diatas jumlah Kapasitas Fiskal tertuang kota Kediri tahun 2007 -2009 seperti Tabel 26.

Tabel 26. Jumlah Kapasitas Fiskal Kota Kediri Tahun 2007-2009 (Rp.)

Periode Tahun	Jumlah	Bertambah (Berkurang)
2007	104.489.708.907,60	-
2008	120.462.375.868,96	15.972.666.961,36
2009	171.911.273.344,61	51.448.897.475,65

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 26 dapat dijelaskan bahwa Kapasitas Fiskal Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 jumlah Kapasitas Fiskal sebesar Rp104.489.708.907,60, pada tahun tersebut Jumlah Kapasita Fiskal tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya karena data yang digunakan peneliti hanya pada tahun 2007-2009. Tahun 2008 Jumlah Kapasitas Fiskal mengalami peningkatan sejumlah Rp120.462.375.868,96 yaitu bertambah sebesar Rp15.972.666.961,36. Peningkatan jumlah Kapasitas Fiskal terbesar terjadi pada tahun 2009 sejumlah Rp171.911.273.344,61 yaitu Rp51.448.897.475,65 lebih besar dari tahun sebelumnya. Semakin meningkatnya jumlah Kapasitas Fiskal tiap tahun menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri semakin baik dalam menggali potensi pendapatan daerahnya.

d). Perhitungan Celah Fiskal (CF)

Jumlah Celah Fiskal Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009 adalah sebagai berikut:

$$CF = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dari perhitungan diatas Jumlah Celah Fiskal tertuang dalam Tabel 27, sebagai berikut:

Tabel 27. Jumlah Celah Fiskal Kota Kediri Tahun 2007-2009 (Rp.)

Periode Tahun	Jumlah	Bertambah (Berkurang)
2007	137.978.508.945,81	-
2008	131.822.167.243,16	(6.156.341.702,65)
2009	171.653.644.188,67	39.831.476.945,51

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 27 diatas , dapat diketahui bahwa Celah Fiskal Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009 jumlahnya berubah-ubah. Pada tahun 2007 jumlah Celah fiskal Kota Kediri sebesar Rp137.978.508.945,81. Pada tahun tersebut Jumlah Celah Fiskal tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya, karena peneliti hanya menggunakan data aatahun 2007-2009. Pada tahun 2008 mengalami penurunan sejumlah Rp131.822.167.243,16 yaitu berkurang sebesar Rp6.156.341.702,65 dari tahun sebelumnya. Kondisi pada tahun 2009 berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini jumlah Celah Fiskal meningkat sejumlah Rp171.653.644.188,67 yaitu bertambah sebesar Rp39.831.476.945,51. Peningkatan jumlah Celah Fiskal pada tahun 2009 adalah dikarenakan meningkatnya jumlah Kebutuhan Fiskal yang tidak di imbangi dengan peningkatan Kapasitas Fiskal.

**c. Pengkroscekan Hasil Perhitungan Celah Fiskal dan Alokasi Dasar ke Pasal 45 PP 55/2005.**

Setelah melakukan perhitungan Alokasi Dasar dan Celah Fiskal, maka dilakukan pengkroscekan DAU ke Pasal 45 PP 55/2005, tentang Ketentuan Dalam Pengalokasian Dana Alokasi Umum ke Suatu Daerah yang meliputi :

- a. Jika suatu daerah memiliki nilai Celah Fiskal lebih besar dari pada 0 (nol), maka daerah tersebut menerima Dana Alokasi Umum sebesar Alokasi Dasar ditambah dengan Celah Fiskal.
- b. Jika suatu daerah memiliki nilai Celah Fiskal sama dengan 0 (nol), maka daerah tersebut menerima Dana Alokasi Umum sebesar Alokasi Dasar.
- c. Jika suatu daerah memiliki nilai Celah Fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil

dari Alokasi Dasar, maka daerah tersebut menerima Dana Alokasi Umum sebesar Alokasi Dasar setelah diperhitungkan nilai Celah Fiskal.

- d. Jika suatu daerah memiliki nilai Celah Fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama dengan atau lebih besar dari Alokasi Dasar, maka daerah tersebut tidak menerima Dana Alokasi Umum.

Dari Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Celah Fiskal Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 selalu lebih besar dari 0 (nol), sehingga jumlah Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke Kota Kediri dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{PENGALOKASIAN DAU} = \text{ALOKASI DASAR} + \text{CELAH FISKAL}$$

Dari perhitungan diatas Jumlah Pengalokasian Dana Alokasi Umum ke Kota Kediri dari tahun 2008 sampai dengan 2010 tertuang dalam Tabel 28, berikut ini:

Tabel 28. Jumlah Pengalokasian DAU Kota Kediri Periode Tahun 2008-2010 (Rp.)

Periode Tahun	Jumlah	Bertambah (Berkurang)
2007	327.510.960.922,81	-
2008	372.584.341.316,72	45.073.380.393,91
2009	472.794.364.191,54	100.210.022.874,82

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 28 diatas, dapat dijelaskan bahwa pengalokasian Dana Alokasi Umum Kota Kediri tahun 2008 sampai dengan 2010 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah pengalokasian Dana Alokasi Umum yang diterima Kota Kediri sebesar Rp327.510.960.922,81. Pada tahun tersebut Jumlah Pengalokasian DAU tidak terdapat keterangan bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya, karena peneliti hanya menghitung pengalokasian DAU pada tahun 2008-2010. Tahun 2009 pengalokasian Dana Alokasi Umum meningkat sejumlah Rp372.584.341.316,72 yaitu bertambah sebesar Rp45.073.380.393,91. Pada tahun 2010 jumlah pengalokasian Dana Alokasi Umum meningkat sejumlah Rp472.794.364.191,54 yaitu



Rp100.210.022.874,82 lebih besar dari tahun sebelumnya, sehingga total pengalokasian Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kota Kediri meningkat besar. Peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Umum yang diterima Kota Kediri tersebut adalah dikarenakan besarnya jumlah Kebutuhan Fiskal yang tidak diimbangi dengan meningkatnya Kapasitas Fiskal, sehingga Kota Kediri masih bergantung dengan dana bantuan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai pembangunannya. Dengan meningkatnya jumlah Dana Alokasi Umum hal itu mencerminkan bahwa daerah tersebut masih kurang mandiri.

**B. Menghitung Kontribusi Dana Alokasi Umum Pada Pendapatan Daerah**

Kontribusi Dana Alokasi Umum pada Pendapatan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi DAU} = \frac{\text{Jumlah Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah sesuai dengan yang tertuang dalam Tabel 29

Tabel 29. Kontribusi DAU Pada Pendapatan Daerah Kediri Periode Tahun 2008-2010 (%.)

Periode Tahun	Jumlah	Bertambah (Berkurang)
2007	56,47	-
2008	55,43	(1,04)
2009	65,98	10,55

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Tabel 29 dapat di simpulkan bahwa Kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah dari tahun 2008 sampai dengan 2010 berubah-ubah. Tahun 2008 jumlah kontribusi Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah mencapai 56,47%. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum berperan lebih dari setengah jumlah Pendapatan Daerah Kota Kediri. Pada tahun tersebut Jumlah Kontribusi DAU pada Pendapatan Daerah tidak terdapat keterangan

bertambah atau berkurang dari tahun sebelumnya, karena peneliti hanya menghitung Kontribusi DAU pada Pendapatan Daerah dari tahun 2008-2010. Pada tahun 2009 jumlah kontribusi Dana Alokasi Umum turun menjadi 55,43% yaitu 1,04% lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2009 ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri bisa lebih mandiri dari pada tahun sebelumnya karena kontribusi Dana Alokasi Umum tahun tersebut lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2010 kondisinya berbanding terbalik dari tahun sebelumnya karena pada tahun ini kontribusi Dana Alokasi Umum naik sebesar 65,98% yaitu meningkat sebesar 10,55% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Kediri pada tahun 2010 mengalami penurunan dalam hal kemandirian pembiayaan pembangunan daerah, karena semakin meningkatnya jumlah kontribusi

Alokasi Umum pada Pendapatan Daerah tahun tersebut. Dari tahun 2008 sampai dengan 2010, Kota Kediri paling mandiri pada tahun 2009 sedangkan Kota Kediri sangat bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah adalah pada tahun 2010. Dari keseluruhan tahun 2008 sampai dengan 2010 Kota Kediri tergolong kurang mandiri karena masih sangat memerlukan bantuan dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari besarnya Jumlah Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah yang melebihi 50%.

**C. Memasukkan Serta Menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat pada Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008-2010 berikut ini.

- a). Realisasi Neraca APBD Tahun 2008

Tabel 30. Realisasi Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Periode Tahun 2008 (Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Realisasi APBD 2008 Menurut Pemerintah Kota Kediri	Realisasi APBD 2008 Menurut Perhitungan Peneliti
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>507.340.928.106,77</b>	<b>507.340.928.106,77</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>74.775.278.043,96</b>	<b>74.775.278.043,96</b>
<b>1.1.1</b>	Pendapatan Pajak Daerah	12.895.136.002,00	12.895.136.002,00
<b>1.1.2</b>	Pendapatan Retribusi Daerah	48.350.618003,91	48.350.618003,91
<b>1.1.3</b>	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	996.452.063,86	996.452.063,86
<b>1.1.4</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.533.071.974,19	12.533.071.974,19
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>432.510.821.062,81</b>	<b>432.510.821.062,81</b>
<b>1.2.1</b>	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	397.089.058.747,81	397.089.058.747,81
<b>1.2.1.1</b>	DBH Pajak	41.493.725.000,00	41.493.725.000,00
<b>1.2.1.2</b>	DBH Bukan Pajak	4.193.372.825,00	4.193.372.825,00
<b>1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>400.161.615.000,00</b>	<b>327.510.960.922,81</b>
<b>1.2.1.4</b>	Dana Alokasi Khusus	23.891.000.000,00	23.891.000.000,00
<b>1.2.2</b>	Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	11.835.903.598,00	11.835.903.598,00
<b>1.2.2.2</b>	Dana Penyesuaian	11.835.903.598,00	11.835.903.598,00
<b>1.2.3</b>	Transfer Pemerintah Provinsi	23.585.858.717,00	23.585.858.717,00
<b>1.2.3.1</b>	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.585.858.717,00	23.585.858.717,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>54.829.000,00</b>	<b>54.829.000,00</b>
<b>1.3.3</b>	Pendapatan lainnya	54.829.000,00	54.829.000,00
	<b>PASIVA</b>		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>524.519.962.240,31</b>	<b>524.519.962.240,31</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>399.993.358.960,31</b>	<b>399.993.358.960,31</b>
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai	240.762.174.073,56	240.762.174.073,56
<b>2.1.2</b>	Belanja Barang	93.587.384.407,43	93.587.384.407,43
<b>2.1.4</b>	Belanja Subsidi	6.093.410.000,00	6.093.410.000,00
<b>2.1.5</b>	Belanja Hibah	30.373.730.733,69	30.373.730.733,69
<b>2.1.6</b>	Belanja Bantuan Sosial	15.878.675.742,00	15.878.675.742,00
<b>2.1.7</b>	Belanja Bantuan Keuangan	13.297.984.003,63	13.297.984.003,63
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>124.158.953.280,00</b>	<b>124.158.953.280,00</b>
<b>2.2.1</b>	Belanja Tanah	700.741.000,00	700.741.000,00
<b>2.2.2</b>	Belanja Peralatan dan Mesin	28.095.604.025,00	28.095.604.025,00
<b>2.2.3</b>	Belanja Bangunan dan Gedung	65.535.460.517,00	65.535.460.517,00
<b>2.2.4</b>	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	24.231.915.738,00	24.231.915.738,00
<b>2.2.5</b>	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.595.232.000,00	5.595.232.000,00
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1</b>	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>	<b>367.650.000,00</b>	<b>367.650.000,00</b>
<b>2.4.1</b>	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	367.650.000,00	367.650.000,00
<b>2.4.1.2</b>	Bagi Hasil Retribusi	367.650.000,00	367.650.000,00
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>55.471.619.943,65</b>	<b>(17.179.034.133,54)</b>

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Realisasi Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum masuk di dalam pendapatan APBD, tepatnya

pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat atau biasa disebut Dana Perimbangan. Sehingga semakin besar jumlah DAU yang diterima akan menambah jumlah Pendapatan Daerah pada APBD. Jumlah DAU yang dihitung peneliti jumlahnya jauh lebih kecil

di dibandingkan dengan realisasi DAU dari Pemerintah Pusat. Jumlah realisasi DAU APBD dengan realisasi yang dihitung oleh peneliti jumlahnya berbeda, hal ini wajar terjadi karena kebijakan Pemerintah Pusat tentang pengalokasian DAU dari tahun ke tahun

cenderung berubah-ubah. Jumlah DAU juga di sesuaikan dengan jumlah Dana Perimbangan lainnya sesuai dengan kebijakannya masing-masing.

#### b. Realisasi Neraca APBD Tahun 2009

Tabel 30. Realisasi Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Periode Tahun 2009 (Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Realisasi APBD 2009 Menurut Pemerintah Kota Kediri	Realisasi APBD 2009 Menurut Perhitungan Peneliti
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>636.567.850.742,33</b>	<b>636.567.850.742,33</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>88.849.647.034,61</b>	<b>88.849.647.034,61</b>
<b>1.1.1</b>	Pendapatan Pajak Daerah	14.237.388.734,00	14.237.388.734,00
<b>1.1.2</b>	Pendapatan Retribusi Daerah	10.494.169.558,34	10.494.169.558,34
<b>1.1.3</b>	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.165.745.481,36	1.165.745.481,36
<b>1.1.4</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	62.952.343.260,91	62.952.343.260,91
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>534.965.688.707,72</b>	<b>534.965.688.707,72</b>
<b>1.2.1</b>	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	483.905.967.626,72	483.905.967.626,72
<b>1.2.1.1</b>	DBH Pajak	80.773.104.048,00	80.773.104.048,00
<b>1.2.1.2</b>	DBH Bukan Pajak	2.288.522.262,00	2.288.522.262,00
<b>1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>408.246.662.000,00</b>	<b>372.584.341.316,72</b>
<b>1.2.1.4</b>	Dana Alokasi Khusus	28.260.000.000,00	28.260.000.000,00
<b>1.2.2</b>	Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	16.832.805.000,00	16.832.805.000,00
<b>1.2.2.2</b>	Dana Penyesuaian	16.832.805.000,00	16.832.805.000,00
<b>1.2.3</b>	Transfer Pemerintah Provinsi	34.226.916.081,00	34.226.916.081,00
<b>1.2.3.1</b>	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	34.226.916.081,00	34.226.916.081,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>12.752.515.000,00</b>	<b>12.752.515.000,00</b>
<b>1.3.3</b>	Pendapatan lainnya	12.752.515.000,00	12.752.515.000,00
	<b>PASIVA</b>		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>707.190.775.420,48</b>	<b>707.190.775.420,48</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>509.566.448.346,48</b>	<b>509.566.448.346,48</b>
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai	301.140.720.002,87	301.140.720.002,87
<b>2.1.2</b>	Belanja Barang	115.566.246.655,61	115.566.246.655,61
<b>2.1.4</b>	Belanja Subsidi	0,00	0,00
<b>2.1.5</b>	Belanja Hibah	42.602.462.260,00	42.602.462.260,00
<b>2.1.6</b>	Belanja Bantuan Sosial	26.527.146.972,00	26.527.146.972,00
<b>2.1.7</b>	Belanja Bantuan Keuangan	23.729.872.456,00	23.729.872.456,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>197.282.177.074,00</b>	<b>197.282.177.074,00</b>
<b>2.2.1</b>	Belanja Tanah	8.655.617.000,00	8.655.617.000,00
<b>2.2.2</b>	Belanja Peralatan dan Mesin	38.195.252.095,00	38.195.252.095,00
<b>2.2.3</b>	Belanja Bangunan dan Gedung	98.663.195.609,00	98.663.195.609,00
<b>2.2.4</b>	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.467.185.370,00	51.467.185.370,00
<b>2.2.5</b>	Belanja Aset Tetap Lainnya	300.927.000,00	300.927.000,00
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.1</b>	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>	<b>342.150.000,00</b>	<b>342.150.000,00</b>
<b>2.4.1</b>	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	342.150.000,00	342.150.000,00
<b>2.4.1.2</b>	Bagi Hasil Retribusi	342.150.000,00	342.150.000,00
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>(34.960.603.994,87)</b>	<b>(70.622.924.678,15)</b>

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Realisasi Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum masuk di dalam pendapatan APBD, tepatnya pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat atau biasa disebut Dana Perimbangan. DAU tersebut menambah jumlah Pendapatan Daerah Kota Kediri. Jumlah

realisasi DAU dari Pemerintah Pusat jumlahnya lebih besar dari pada relisasi DAU yang dihitung oleh peneliti. Perbedaan tersebut masih wajar terjadi karena adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang hanya diketahui oleh Pemerintah Pusat itu sendiri.

### c. Realisasi Neraca APBD Tahun 2010

Tabel 30. Realisasi Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Kediri Periode Tahun 2009 (Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Realisasi APBD 2010 Menurut Pemerintah Kota Kediri	Realisasi APBD 2010 Menurut Perhitungan Peneliti
	<b>AKTIVA</b>		
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>767.530.061.790,18</b>	<b>767.530.061.790,18</b>
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>92.690.293.448,64</b>	<b>92.690.293.448,64</b>
<b>1.1.1</b>	Pendapatan Pajak Daerah	16.923.398.116,00	16.923.398.116,00
<b>1.1.2</b>	Pendapatan Retribusi Daerah	9.987.027.217,94	9.987.027.217,94
<b>1.1.3</b>	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.212.138.061,13	1.212.138.061,13
<b>1.1.4</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.567.730.053,57	64.567.730.053,57
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>664.524.698.341,54</b>	<b>664.524.698.341,54</b>
<b>1.2.1</b>	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	567.446.924.362,54	567.446.924.362,54
<b>1.2.1.1</b>	DBH Pajak	87.212.728.761,00	87.212.728.761,00
<b>1.2.1.2</b>	DBH Bukan Pajak	6.536.131.410,00	6.536.131.410,00
<b>1.2.1.3</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>	<b>421.789.650.000,00</b>	<b>472.794.364.191,54</b>
<b>1.2.1.4</b>	Dana Alokasi Khusus	903.700.000,00	903.700.000,00
<b>1.2.2</b>	Transfer Pemerintah Pusat-lainnya	58.668.896.000,00	58.668.896.000,00
<b>1.2.2.2</b>	Dana Penyesuaian	58.668.896.000,00	58.668.896.000,00
<b>1.2.3</b>	Transfer Pemerintah Provinsi	38.408.877.979,00	38.408.877.979,00
<b>1.2.3.1</b>	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	38.408.877.979,00	38.408.877.979,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>10.315.070.000,00</b>	<b>10.315.070.000,00</b>
<b>1.3.3</b>	Pendapatan lainnya	10.315.070.000,00	10.315.070.000,00
	<b>PASIVA</b>		
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>715.041.743.480,29</b>	<b>715.041.743.480,29</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>555.277.435.837,29</b>	<b>555.277.435.837,29</b>
<b>2.1.1</b>	Belanja Pegawai	364.383.341.021,99	364.383.341.021,99
<b>2.1.2</b>	Belanja Barang	108.361.557.932,30	108.361.557.932,30
<b>2.1.4</b>	Belanja Subsidi	-	-
<b>2.1.5</b>	Belanja Hibah	26.990.308.740,00	26.990.308.740,00
<b>2.1.6</b>	Belanja Bantuan Sosial	32.008.220.535,00	32.008.220.535,00
<b>2.1.7</b>	Belanja Bantuan Keuangan	23.534.007.608,00	23.534.007.608,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>158.431.307.643,00</b>	<b>158.431.307.643,00</b>
<b>2.2.1</b>	Belanja Tanah	269.209.685,00	269.209.685,00
<b>2.2.2</b>	Belanja Peralatan dan Mesin	15.948.661.740,00	15.948.661.740,00
<b>2.2.3</b>	Belanja Bangunan dan Gedung	103.649.888.808,00	103.649.888.808,00
<b>2.2.4</b>	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.022.841.805,00	36.022.841.805,00
<b>2.2.5</b>	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.540.705.605,00	2.540.705.605,00
<b>2.3</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>997.350.000,00</b>	<b>997.350.000,00</b>
<b>2.3.1</b>	Belanja Tak Terduga	997.350.000,00	997.350.000,00
<b>2.4</b>	<b>Transfer</b>	<b>335.650.000,00</b>	<b>335.650.000,00</b>
<b>2.4.1</b>	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	335.650.000,00	335.650.000,00
<b>2.4.1.2</b>	Bagi Hasil Retribusi	335.650.000,00	335.650.000,00
	<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>	<b>1.483.604.118,35</b>	<b>52.488.318.309,89</b>

Sumber : Data Primer Diolah

Dari Realisasi Neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Alokasi Umum masuk di dalam pendapatan APBD, tepatnya pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat atau biasa disebut Dana Perimbangan. Dana Alokasi Umum dari tahun 2008 sampai dengan 2010 merupakan jumlah yang paling besar dalam Dana Perimbangan dibanding Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya. Pada keterangan sebelumnya, meskipun dengan jumlah APBD yang devisa, namun pada tahun 2009 masih digolongkan paling mandiri dari tahun-tahun lainnya, karena kemandirian suatu daerah di ukur dengan semakin kecilnya penerimaan jumlah Dana Alokasi Umum bukan dari devisa atau surplusnya APBD.

Semakin besar Celah Fiskal suatu daerah, maka akan memperoleh Dana Alokasi Umum yang semakin besar pula. Namun semakin besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima suatu daerah tidaklah dapat dibanggakan, karena hal itu justru menunjukkan bahwa daerah tersebut masih kurang mandiri dalam membiayai pembangunan daerahnya. Sehingga daerah tersebut masih sangat bergantung terhadap bantuan dana dari Pemerintah Pusat. Padahal Pemerintah mengharapkan kepada tiap-tiap daerah untuk lebih mandiri dan tidak mengandalkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat dengan meminta kepada daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan didaerahnya dengan tepat dan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

a. Pengalokasian Dana Alokasi Umum merupakan dana bantuan dari Pemerintahan Pusat yang tergolong pada Dana Transfer.

Pengalokasian DAU akan menambah Pendapatan Daerah pada APBD.

- b. Pemerintah Kota Kediri merupakan daerah yang memperoleh pengalokasian Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat. Dari tahun 2008 sampai dengan 2010 pengalokasian Dana Alokasi Umum pada Kota Kediri terus meningkat. Tahun 2008 sebesar Rp327.510.960.922,81, tahun 2009 sebesar Rp372.584.341.316,72, sedangkan tahun 2010 sebesar Rp472.794.364.191,54. Naiknya jumlah DAU setiap tahun menunjukkan bahwa Kota Kediri tergolong masih sangat bergantung dengan dana bantuan dari Pemerintah Pusat.
- c. Jumlah Celah Fiskal Kota Kediri dari tahun 2007 sampai dengan 2009 selalu lebih besar dari pada 0 (nol). Tahun 2007 sebesar Rp137.978.508.945,81, tahun 2008 sebesar Rp131.822.167.243,16, sedangkan tahun 2009 sebesar Rp171.653.644.188,67, sehingga Kota Kediri memperoleh pengalokasian DAU sebesar Celah Fiskal ditambah dengan Alokasi Dasar. Jumlah Celah Fiskal Kota Kediri yang lebih dari 0 (nol) tersebut menunjukkan bahwa jumlah Kebutuhan Fiskal Kota Kediri masih jauh lebih besar dari pada jumlah Kapasitas Fiskal, sehingga Kota Kediri masih sangat membutuhkan dana bantuan dari Pemerintah Pusat untuk membiayai pembangunannya.
- d. Semakin meningkatnya jumlah DAU tiap tahun pada APBD tidak membuat pemerintah Kota Kediri terus mengandalkan dana transfer tersebut. Hal ini terbukti dengan menurunnya jumlah kontribusi DAU pada Pendapatan Daerah pada tahun 2009 yang semula pada tahun 2008 sebesar 56,47% turun menjadi 55,43%. Meskipun jumlah kontribusinya kembali meningkat pada tahun 2010

sebesar 65,98%. Naik turunnya jumlah kontribusi tersebut menunjukkan bahwa Kota Kediri terus berusaha menggali sumber-sumber PAD untuk menjadi kota yang lebih mandiri.

#### Saran

- a. Agar Pemerintah Kota Kediri tidak terlalu bergantung dengan pengalokasian DAU, maka pemerintah bisa meningkatkan kemandirian terutama pada Pendapatan Asli Daerah. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Kota Kediri dapat mengembangkan dari sektor pajak dan retribusi. Dengan menggali sumber-sumber pajak dan retribusi melalui perluasan subyek dan obyek pajak dan retribusi.
- b. Mengoptimalkan peran Swasta, BUMD dan BUMN di daerah Kota Kediri. Peranan investasi swasta dan Negara atau Daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Kansil. (2001). *Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Surabaya : Arloka.

\_\_\_\_\_. (2000). *Peraturan Pemerintah Tahun 2000*. Bandung : Citra Umbara.

\_\_\_\_\_. (2005). *Peraturan Pemerintah Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat.

\_\_\_\_\_. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.

Tangkilisan. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Grasindo.

Widjaja. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Www.djpk.depkeu.go.id

Www.bps.go.id

Yani, Ahmad. (2008). *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.